

**KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN
INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
(Studi Empiris Pada DPPKAD Pemerintah Kabupaten Klaten, Boyolali,
Sukoharjo, dan Kota Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

DEMONTI SEPTIANI

B200110 177

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015/2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN
INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Empiris
Pada DPPKAD Pemerintah Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan
Kota Surakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

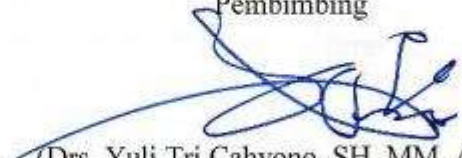
DEMONTI SEPTIANI

B200110.177

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.


Surakarta, 31 Desember 2015

Pembimbing



(Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, Ak)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Drs. Triyono, S.E, M.Si)

ABSTRACT

This research aims to examine human resources, internal control, and utilization of information technology on the quality of local government reporting.

This research object is the local government region of Klaten district, Sukoharjo, Boyolali, and the town solo through financial services and asset management income areas. Sample in the study amount to 200 sample were employees of financial services and asset management income area in the district of Klaten, Sukoharjo, Boyolali, and the town Surakarta. The sample of using purposive sampling. Data analysis were regression linier berganda.

The results of this study showed that the variables of human resources (HR), internal control (PI), the utilization of information technology (PTI) simultaneously affect the quality of reporting of local government to the level of significance of $0.000 < 0.05$.

KeyWords: Human Resources, Control Information, Use of Information Technology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan pemerintah daerah.

Objek penelitian ini adalah DPPKAD Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian berjumlah 200 sampel yaitu Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data memakai regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Intern (PI), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) secara silmutan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam IAI (2012, paragraf 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh penggunanya.

Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Pada kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Menurut penelitian Mardiasmo (2006) Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan

daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil judul penelitian **“Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya manusia, Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Studi Empiris Pada DPPKAD Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Surakarta).”**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut penelitian Haryanto dkk (2007) dalam Faristina (2011) mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2. Sumber Daya Manusia

Menurut penelitian Hullah dkk (2012) sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut penelitian Winindyaningrum dan Rahmawati (2010) perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga membutuhkan SDM yang responsif.

3. Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang intergal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi, dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut penelitian Mustafa, dkk (2010) pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi menggunakan teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran.

5. Kualitas

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang me-nyesatkan, kesalahan material serta dapat di-andalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode se-belumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pe-ngaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak di-wajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

6. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pada dasarnya asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). SAP bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah (KKAP) paragraf 24 diatur dalam PP No.71/2010 bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Survey dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Solo. Menurut Djarwanto (2010: 107) populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi pada penelitian ini adalah semua pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan DPPAKD Kabupaten Klaten (43), Boyolali (45), Sukoharjo (45), dan Kota Solo (44).

Sampel penelitian ini adalah DPPKAD. DPPKAD dipilih dijadikan sebagai sampel penelitian karena DPPKAD merupakan salah satu SKPD yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana

penelitian yang dikumpulkan langsung dari responden oleh penelitian guna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di DPPKAD dari masing-masing daerah.

Tabel I 1
JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	76	42.9%
Perempuan	101	57.1%
Total	177	100.0%

Sumber: Data primer diolah penulis, 2015

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dibandingkan dengan *level of significant* (0,05) dan nilai t_{hitung} (5,294) lebih besar dari t_{tabel} (1,974).
2. Pengendalian intern berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dibandingkan dengan *level of significant* (0,05) dan nilai t_{hitung} (53,538) lebih besar dari t_{tabel} (1,974).
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,003) yang lebih kecil dibandingkan dengan *level of significant* (0,05) dan nilai t_{hitung} (2,961) lebih besar dari t_{tabel} (1,974).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Pemda Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta pegawai yang melaksanakan fungsi penyusunan APBD, sehingga untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas obyek penelitiannya.
2. Keterbatasan pada metode survei bahwa peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden, sehingga dapat saja pengisian kuisioner ini dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat responden yang bersangkutan.
3. Mengingat belum banyaknya penelitian sejenis yang dilakukan secara empiris, sehingga menyebabkan peneliti kurang mampu membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian lainnya. Akibatnya generalisasi atas hasil temuan kurang dapat dikonfirmasi dengan penelitian lainnya.

Saran

Beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian berikutnya disarankan melakukan penelitian dengan obyek penelitian yang lebih luas, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Bagi penelitian berikutnya hendaknya dapat menggunakan metode tambahan yaitu wawancara secara mendalam dengan responden (*depth interview*) agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.
3. Penelitian ini memberikan peluang untuk dilakukan penelitian berikutnya, mengingat penelitian sejenis yang bersifat empiris belum banyak dilakukan, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik di masa datang. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terutama dalam rangka peningkatan kerja paratur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, Made Ayu; Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmaja. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)*.
- Ghozali, Imam. 2011. "Analisis Multivariate dengan SPSS", Semarang: BP UNDIP.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah", Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2014: 26-44*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang “Organisasi Perangkat Daerah”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”.
- Ramadan, Sahrul. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri dalam *jurnal.umrah.ac.id/.../jurnal-sahrul-ramadan-100462201261-akuntansi-2 diakses* tanggal 17 November 2015 jam 13.15 WIB.
- Roshanti, Arina; Edy Sujana; dan Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)*.
- Sapitri, Ni Made Trisna; I Gst Ayu Purnamawati, dan Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No 1 Tahun 2015)*.
- Setiawati, Erma dan Shinta Permata Sari. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014: 427-444*.
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada